

**TUGAS MANAJEMEN PUBLIK**

**“Analisis Pelayanan Publik di Sektor Pendidikan Sekolah Negeri Pada Daerah 3T**

**Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku”**



**Dosen Pengampu : Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D**

**Disusun Oleh :**

**Adhizsa Kirana Ramadya**

**(2316041066)**

**Reguler B**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

**2024**

## A. PENDAHULUAN

Di tengah gempuran modernisasi dan kemajuan teknologi, masih terdapat daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Indonesia yang tertinggal dalam akses pendidikan. Salah satu contohnya adalah Maluku Barat Daya, sebuah kepulauan di ujung tenggara nusantara dengan kondisi geografis yang menantang dan infrastruktur yang terbatas. Di wilayah ini, penyelenggaraan pelayanan publik di bidang Pendidikan sekolah menghadapi berbagai hambatan dan permasalahan yang kompleks.

Tingkat kesejahteraan pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan kemiskinan di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) masih memprihatinkan. Upaya-upaya pembenahan terus dilakukan oleh pemerintah. Namun sampai saat ini, belum ada tanda-tanda perubahan besar, terutama di bidang pendidikan.

Pada daerah pelosok di MBD, Beberapa sekolah tak punya perpustakaan, bahan ajar dan buku bacaan sangat minim, ditambah lagi sulitnya akses jalan dari kecamatan menuju kabupaten, serta tidak adanya penerang listrik dan jaringan telekomunikasi. Alhasil, kemajuan pendidikan terhambat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelayanan publik sekolah di daerah 3T Maluku Barat Daya, dengan fokus pada beberapa aspek utama, yaitu:

- Akses pendidikan: Bagaimana akses pendidikan bagi anak-anak di daerah 3T Maluku Barat Daya?
- Kualitas pendidikan: Bagaimana kualitas pendidikan di sekolah-sekolah di daerah 3T Maluku Barat Daya? Apakah terdapat
- Kesadaran masyarakat: Bagaimana tingkat kesadaran masyarakat di daerah 3T Maluku Barat Daya tentang pentingnya pendidikan? Apakah terdapat faktor budaya atau tradisi yang menghambat akses pendidikan?
- Upaya pemerintah: Apa saja upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik sekolah di daerah 3T Maluku Barat Daya? Apakah upaya tersebut efektif dalam mengatasi berbagai tantangan yang ada?

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang kondisi pelayanan publik sekolah di daerah 3T Maluku Barat Daya, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat dan mendukung akses pendidikan di

wilayah tersebut. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan berharga bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan program yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah 3T Maluku Barat Daya.

## **B. ANALISIS**

Berdasarkan potret penilaian di Maluku, Kabupaten Maluku Barat Daya masuk dalam kategori yang rendah selama 2 tahun penilaian yakni pada 2021 dan 2022 terkait pelayanan publik. Hal ini disebabkan oleh dimensi input dengan variabel kompetensi penyelenggara layanan yang masih perlu ditingkatkan, sarana dan prasarana dasar layanan tidak memadai, dokumen pendukung penyelenggaraan pelayanan yang sebagian tidak ada, kurangnya proses layanan secara elektronik dan publikasi website serta mengenai pengaduan belum seluruhnya dilaksanakan oleh OPD.

Berdasarkan data dan informasi yang tersedia, berikut adalah beberapa kondisi pelayanan publik pendidikan di daerah 3T MBB:

### ➤ Infrastruktur pendidikan:

Banyak sekolah di daerah 3T Maluku Barat Daya yang rusak dan tidak layak pakai. Fasilitas belajar seperti meja, kursi, dan papan tulis masih kurang memadai. Akses internet dan listrik masih terbatas.

### ➤ Ketersediaan guru:

Kekurangan guru yang qualified di daerah 3T Maluku Barat Daya. Banyak guru yang mengajar di beberapa sekolah sekaligus. Distribusi guru tidak merata, dengan beberapa sekolah yang tidak memiliki guru tetap.

### ➤ Akses pendidikan:

Jarak tempuh ke sekolah yang jauh dan medan yang sulit. Biaya pendidikan yang tinggi. Kurangnya minat masyarakat untuk menyekolahkan anak-anak mereka.

### ➤ Kualitas pendidikan:

Nilai ujian yang rendah. Kurangnya minat belajar siswa. Metode pengajaran yang tidak efektif.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelayanan Publik Pendidikan di Daerah 3T MBB  
Beberapa faktor yang mempengaruhi pelayanan publik pendidikan di daerah 3T MBB antara lain:

➤ Keterbatasan geografis:

Lokasi daerah 3T MBB yang terpencil dan sulit dijangkau.

Medan yang sulit dan infrastruktur transportasi yang tidak memadai.

➤ Keterbatasan anggaran:

Anggaran pemerintah untuk pendidikan di daerah 3T MBB masih terbatas.

Dana BOS dan dana pendidikan lainnya belum dimanfaatkan secara optimal.

➤ Kurangnya koordinasi antar instansi:

Kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan instansi terkait dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah 3T MBB.

Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan.

Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan sekolah.

Pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan pelayanan publik pendidikan di daerah 3T MBB, antara lain:

- 1) Membangun infrastruktur sekolah
- 2) Pemerintah membangun sekolah baru dan merenovasi sekolah yang rusak.
- 3) Menyediakan fasilitas belajar seperti meja, kursi, dan papan tulis.
- 4) Memperluas akses internet dan listrik.
- 5) Memberikan bantuan biaya pendidikan kepada siswa yang tidak mampu.
- 6) Membangun sekolah-sekolah baru di daerah terpencil.
- 7) Meningkatkan sosialisasi tentang pentingnya pendidikan kepada masyarakat.
- 8) Meningkatkan kualitas pendidikan:
- 9) Menyusun kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di daerah 3T MBB.

Analisis menggunakan teori Resources Allocation Models/Jobs Characteristic Models (Richard Hackman and Greg R Oldham, 1976)

Teori Resources Allocation Models (Hackman & Oldham, 1976) dapat digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi motivasi dan kinerja guru di daerah 3T,

sehingga dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah 3T Maluku Barat Daya tersebut.

Menganalisis pelayanan publik pendidikan di daerah 3T Maluku Barat Daya dengan menggunakan teori Resources Allocation Models (Hackman & Oldham, 1976) dapat dilakukan dengan lima aspek utama :

1. Variasi tugas:

Guru di daerah 3T umumnya memiliki tugas yang monoton dan berulang, seperti mengajar mata pelajaran yang sama setiap hari. Kurangnya peluang untuk terlibat dalam kegiatan pengembangan profesional, seperti pelatihan dan seminar.

Minimnya kesempatan untuk berkolaborasi dengan guru lain dan berbagi ide.

2. Identitas tugas:

Guru di daerah 3T sering merasa tidak memiliki tugas yang mereka lakukan karena minimnya sumber daya dan dukungan dari pemerintah.

Kurangnya rasa kepemilikan atas hasil belajar siswa karena berbagai faktor eksternal yang memengaruhi prestasi belajar.

3. Signifikansi tugas:

Guru di daerah 3T memahami bahwa tugas mereka penting untuk masa depan anak-anak di daerah tersebut.

Namun, mereka sering merasa bahwa upaya mereka tidak dihargai oleh masyarakat karena rendahnya kualitas pendidikan di daerah 3T.

4. Otonomi:

Guru di daerah 3T memiliki otonomi yang terbatas dalam menentukan cara mereka mengajar.

Kurikulum dan metode mengajar ditentukan secara terpusat oleh pemerintah.

Kurangnya ruang untuk berinovasi dan mencoba pendekatan mengajar yang baru.

## 5. Umpan balik:

Guru di daerah 3T jarang menerima umpan balik yang konstruktif tentang kinerja mereka.

Kurangnya sistem evaluasi guru yang efektif dan berkelanjutan.

Minimnya kesempatan untuk mendapatkan bimbingan dan mentoring dari guru yang lebih berpengalaman.

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah 3T Maluku Barat Daya, perlu dilakukan upaya-upaya berikut:

- Meningkatkan variasi tugas guru dengan memberikan kesempatan untuk mengajar berbagai mata pelajaran, terlibat dalam kegiatan pengembangan profesional, dan berkolaborasi dengan guru lain.
- Memperkuat identitas tugas guru dengan memberikan mereka lebih banyak tanggung jawab atas hasil belajar siswa dan meningkatkan pengakuan atas upaya mereka.
- Meningkatkan signifikansi tugas guru dengan membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan peran guru dalam mencerdaskan bangsa.
- Memberikan otonomi yang lebih besar kepada guru dalam menentukan cara mereka mengajar dan mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan siswa di daerah 3T.
- Membangun sistem evaluasi guru yang efektif dan berkelanjutan, serta memberikan umpan balik yang konstruktif dan tepat waktu kepada guru

### C. KESIMPULAN

Daerah 3T (Terpencil, Terluar, dan Tertinggal) di Maluku Barat Daya (MBD) memiliki banyak tantangan dalam menyediakan pelayanan publik yang berkualitas, termasuk di bidang pendidikan. Keterbatasan infrastruktur, kekurangan guru, dan akses yang sulit menjadi beberapa kendala utama yang dihadapi oleh institusi pendidikan di daerah 3T MBD.

Tingkat kesejahteraan pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan kemiskinan di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) masih memprihatinkan. Pada daerah pelosok di MBD, Beberapa sekolah tak punya perpustakaan, bahan ajar dan buku bacaan sangat minim, ditambah lagi sulitnya akses jalan dari kecamatan menuju kabupaten, serta tidak adanya penerang listrik dan jaringan telekomunikasi. Alhasil, kemajuan pendidikan terhambat.

Berdasarkan penilaian dan tinjauan, pelayanan publik di instansi pendidikan sekolah di daerah 3T, khususnya di Maluku Barat Daya, menghadapi tantangan yang perlu segera diatasi. Beberapa catatan penting meliputi:

- 1) Kepatuhan Rendah: Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya memperoleh nilai terendah dalam kepatuhan pelayanan publik. Ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam penyelenggaraan layanan.
- 2) Aksesibilitas: Jarak dan minimnya infrastruktur transportasi menjadi kendala utama. Upaya untuk memperbaiki aksesibilitas pendidikan harus menjadi prioritas.
- 3) Kualitas Fasilitas: Fasilitas belajar di sekolah perlu ditingkatkan agar memadai. Ruang kelas, perpustakaan, dan sarana olahraga harus diperhatikan.
- 4) Kualifikasi Guru: Penempatan guru berkualitas dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia harus diperkuat.
- 5) Partisipasi Masyarakat: Keterlibatan orang tua siswa dan komite sekolah penting dalam mengelola sekolah. Masyarakat harus aktif berkontribusi.

Dengan menggunakan kerangka teori Resources Allocation Models/Jobs Characteristic Models, terlihat bahwa berbagai kendala yang dihadapi oleh sekolah di Daerah 3T Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku telah berdampak pada rendahnya variasi tugas, Identitas tugas, signifikan tugas, otonomi, dan umpan balik dari tenaga kerja dan sumber daya manusia di Maluku Barat Daya. Hal ini pada akhirnya berimplikasi pada

kualitas Pendidikan yang diberikan oleh pemerintah dan minimnya kesadaran Masyarakat tentang pentingnya pendidikan

Dengan menggunakan kerangka teori Resources Allocation Models/Jobs Characteristic Models, terlihat bahwa berbagai kendala yang dihadapi oleh sekolah di Daerah 3T Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku telah berdampak pada rendahnya variasi tugas, Identitas tugas, signifikan tugas, otonomi, dan umpan balik dari tenaga kerja dan sumber daya manusia di Maluku Barat Daya. Hal ini pada akhirnya berimplikasi pada kualitas Pendidikan yang diberikan oleh pemerintah dan minimnya ketertarikan Masyarakat terhadap Pendidikan Teori Resources Allocation Models/Jobs Characteristic Models sangat penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan organisasi. Teori ini membantu dalam mengelola sumber daya secara efektif dan memenuhi karakteristik pekerjaan yang sesuai untuk meningkatkan motivasi dan kinerja pekerja. Dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait, pelayanan publik di Maluku Barat Daya dapat ditingkatkan demi masa depan yang lebih baik bagi seluruh warga daerah ini. Semoga dengan upaya bersama, daerah 3T dapat menjadi lebih inklusif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

#### D. REFERENSI

- Agus Dwiyanto. (2021). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Gadjah Mada University Press. Diakses dari
- Muhanad Mu'iz Raharjo. (2022). *Manajemen Pelayanan Publik*. PT Bumi Aksara.
- Budi Setiyono. (2023). *Pemerintahan dan Manajemen Sektor Publik*. CAPS
- Yesi, Rafik., dkk. (2023). *Pengantar Ilmu Manajemen Pendidikan: Teori dan Praktek Mengelola Lembaga Pendidikan Era Industri 4.0 & Society 5.0*. Sonpedia
- Marjoni Rachman. (2021). *Manajemen Pelayanan Publik*. Tahta Media Group
- Oktavuri R. (2023). *Tinjauan Pelayanan Publik Di Kabupaten Maluku Barat Daya*. Ombudsman RI. Diakses dari <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwksiaran--tinjauan-pelayanan-publik-di-kabupaten-maluku-barat-daya-ombudsman-ri-berikan-catatan>
- Dini, Fikri., dkk. (2023). *Mengatasi Ketimpangan Pendidikan di Daerah Tertinggal*. *Koran Tempo*. Diakses dari <https://koran.tempo.co/read/pendidikan/485061/ketimpangan-pendidikan-di-daerah-3t>
- M Akbar. (2019). *Secercah Harapan dalam Kelamnya Sarana Pendidikan di Pelosok Maluku*. *Lentera Maluku*. Diakses dari <https://kumparan.com/lenteramaluku/secercah-harapan-dalam-kelamnya-sarana-pendidikan-di-pelosok-maluku-1r7Z8vf6WqN>
- Amos, Wenno, Agustina. (2021). *Hubungan Pendidikan gaya Bank sarana dan prasarana terhadap mutu sekolah di SMP se-Kecamatan Moe Kabupaten Maluku Barat Daya*. *Jurnal ilmiah Mara Christy*. Diakses dari <https://jurnal.iaknambon.ac.id/index.php/MC/article/download/148/112>
- Heinrich Rakuasa. (2022). *Analisis Spasial-Temporal Perubahan Tutupan Lahan di Kabuoaten Maluku Barat Daya*. *Jurnal Pendidikan dan Penelitian Geografi*. Diakses dari <https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/geographia/article/view/5262>